

**EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT-SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (PNPM-SPP)
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU GAJAH
AIR MOLEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT TINJAUAN
EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI) Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH:

MITA ERIASTI
NIM: 10625003864

**PROGRAM SI
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIA
2010**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Batu Gajah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu Menurut Tinjauan Ekonomi Islam. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan program nasional penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, dan salah satunya adalah program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang memberikan pinjaman kepada perempuan yang mempunyai usaha dan mengalami kekurangan modal.

Latar belakang penulis memilih judul ini karena ingin mengetahui bagaimana efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) ini dalam kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP).

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 100 orang masyarakat yang mendapat pinjaman dana dan sampel dalam penelitian ini adalah 35 responden. Pengambilan sampel menggunakan Metode *Random Sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Observasi*, *Wawancara*, dan *Angket*. Sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah Metode *Deskriptif* yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat efektif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, dilihat dari tanggapan masyarakat yang sangat baik pada Program ini, karena memberikan pinjaman untuk mengatasi kekurangan modal dari usaha yang mereka jalani, serta bila ditinjau dari tinjauan ekonomi Islam program ini baik, karena di dalamnya ada unsur tolong menolong antar sesama manusia, yang mana di dalam Islam tolong menolong dalam kebaikan sangat dianjurkan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan masalah.....	6
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
E. Metodologi Penelitian	7
F. Teknik Pengumpulan Data.	9
G. Analisa Data.	9
H. Metode Penulisan	10
I. Sistematika Penulisan	10
 BAB II GAMBARAN UMUM	
A. Sejarah Kecamatan Pasir Penyu dan Profil Desa Batu Gajah.....	12
B. Struktur Organisasi Desa Batu Gajah	16
C. PNPM, Tujuan serta Visi dan Misi	16

BAB III TELAAH PUSTAKA

A. Kesejahteraan	20
B. Kredit (Pinjaman).....	21
C. Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Syariah.	26

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat- Simpan Pinjam Perempuan(PNPM-SPP) dalam Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat	35
B. Tanggapan Masyarakat terhadap Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.....	45
C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP)	49

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kesejahteraan sosial ekonomi sudah mencapai angka seperti kondisi sebelum krisis bukan berarti masyarakat Indonesia telah mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi. Dalam kenyataannya, dibandingkan dengan keadaan yang dicapai oleh Negara-negara tetangga di ASEAN, tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia masih jauh di bawah mereka.¹

Dewasa ini pemerintah sedang giat-giatnya melaksanakan program-program dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Sebagaimana halnya pembangunan nasional, merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Mulai dari program pemberian bantuan seperti bantuan beras murah bagi masyarakat miskin, pinjaman dana lunak, serta pembangunan sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas transportasi demi meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perhatian khusus terhadap berbagai lapisan masyarakat sangat diperlukan supaya terjadi pemerataan pembangunan. Di sinilah pemerintah harus bersikap adil, yakni dalam arti mengambil kebijakan dan langkah-langkah pembangunan yang

¹ Agus Dwiyanto, DKK, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: LIPI Press, 2005), hal 4.

porposional². Setiap program kesejahteraan masyarakat yang dibuat oleh pemerintah, harus dapat mananggulangi masalah kemiskinan masyarakat yang akhir-akhir ini menjadi masalah besar di Indonesia.

Permasalahan ekonomi yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang dapat menjadi sumber penting pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur. Untuk itu diperlukan perubahan yang bersifat sistemik dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan³.

Hal lain yang amat penting dalam upaya pembangunan kesejahteraan sosial masyarakat adalah partisipasi masyarakat dan lembaga-lembaga sosial masyarakat, karena pemerintah tidak dapat bergerak sendiri dalam melaksanakan pembangunan tanpa merangkul segenap lapisan masyarakat atau kelompok-kelompok sosial masyarakat lainnya⁴.

Akhir-akhir ini masyarakat sedang gencar-gencarnya memperbincangkan salah satu dari program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang dicanangkan pada tahun 2007, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

² Herman Abdullah, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, (Jakarta: RM Book, 2009) hal. 83.

³ Internet, www.google.com.Search:PNPM, 28 Desember 2009

⁴ Herman Abdullah, *Op. Cit*, hal. 84.

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM adalah program nasional dalam kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sedangkan pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan dan meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu, maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan.

Begitu juga program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang ada di desa Batu Gajah kecamatan Pasir Penyu Air Molek merupakan program yang ingin menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang ada, serta dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), yang merupakan program dalam rangka memberikan pinjaman modal kepada perempuan-perempuan yang mempunyai sebuah usaha agar lebih berkembang.

Secara umum, visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera⁵. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini mempunyai

⁵ Internet, www.google.com/VisiMisiPNPM, 05 Januari 2010.

misinya yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan system pembangunan partisipatif.
3. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana masyarakat.
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan⁶.

Hasil dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) di desa Batu Gajah Air Molek ini telah dapat dilihat dari peningkatan usaha kelompok-kelompok yang mendapat pinjaman dana dari program PNPM ini yaitu SPP (Simpan Pinjam Perempuan). Peningkatan ini dapat dilihat dari peningkatan pendapatan, peningkatan volume usaha, dan sebagainya.

Di antara makna kemanusiaan yang paling menonjol dalam ekonomi Islam adalah peranannya dalam mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Islam dengan sistem ekonominya telah mendorong manusia untuk bekerja dan aktif berbuat, bahkan memandangnya sebagai ibadah dan jihad. Tetapi dibalik aktivitas itu semua terdapat tujuan kemanusiaan, yaitu merealisasikan kehidupan yang baik bagi manusia⁷.

⁶ *Ibid.*

⁷ Yusuf Qardawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001) hal. 66.

Tidak aneh, manusia mengharapkan kehidupan yang layak, menyenangkan dan sejahtera, karena sesungguhnya hal itu telah dijadikan Allah sebagai balasan bagi orang yang beriman dan istiqamah dari setiap hamba-Nya.

Dalam Islam, aktivitas ekonomi bertujuan untuk :

1. Memenuhi kebutuhan seseorang secara sederhana,
2. Memenuhi kebutuhan jangka panjang,
3. Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Selama penulis mengamati jalannya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) di desa Batu Gajah ini, dan menurut salah satu tokoh yang berkecimpung dalam pelaksanaan PNPM itu sendiri, bahwa dengan adanya program ini kehidupan dan usaha masyarakat telah meningkat, maka masyarakat banyak yang berminat untuk mendapatkan pinjaman dana tersebut.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan kehidupan masyarakat. Kemudian mengangkatnya dalam sebuah tulisan yang berjudul **“EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (PNPM-SPP) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU GAJAH AIR MOLEK KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT TINJAUAN EKONOMI ISLAM”**

B. BATASAN MASALAH

Mengingat banyaknya masalah yang diteliti serta terbatasnya kemampuan, waktu dan dana yang tersedia, maka dalam penulisan ini penulis membatasi masalah yang diteliti yaitu **EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT-SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (PNPM-SPP) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

C. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis membuat perumusan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat?
- b. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat?
- c. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP)?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP).

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan bagi pecinta ilmu pengetahuan terutama bagi masyarakat umum agar lebih mengenal tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
- b. Sebagai bahan kajian untuk memperdalam dan memperluas cakrawala bagi penulis.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada program S1 pada jurusan Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. METODE PENELITIAN

a. Lokasi penelitian

Lokasi adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan di desa Batu Gajah Air molek Kabupaten Indragiri Hulu. Penulis memilih tempat penelitian di Desa Batu Gajah Air Molek ini karena selama penulis mengamati jalannya PNPM di desa Batu Gajah, penulis melihat perubahan yang terjadi pada perekonomian masyarakat yang mendapat dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan), usaha mereka lebih berkembang dan pendapatan mereka juga mengalami peningkatan, serta dilihat dari beberapa desa yang mendapat dana SPP ini, maka penulis melihat peningkatan yang sangat signifikan terjadi di desa Batu Gajah.

b. Subjek dan objek penelitian

Adapun subjek dari penelitian ini adalah masyarakat yang mendapat bantuan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) itu sendiri. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

c. Populasi dan sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang mendapat bantuan dana SPP (Simpan Pinjam Perempuan) di desa Batu Gajah sebanyak 100 orang. Mengingat waktu, tenaga, dan biaya, maka penulis menggunakan metode *Random Sampling*, dengan mengambil secara acak populasi di atas menjadi sampel sebanyak 35% dari jumlah

populasi 100 orang yaitu sebanyak 35 orang. *Random Sampling* adalah salah satu metode penarikan sampel yang dilakukan dengan cara acak sederhana dan setiap responden memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih sebagai responden.⁸

d. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber data primer yaitu data yang diambil langsung di lapangan dari responden melalui wawancara dan angket.
2. Sumber data skunder yaitu data yang diambil dari beberapa buku yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.

F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Wawancara*

Yaitu penulis mengadakan Tanya jawab dengan pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung mengenai masalah data yang diperlukan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian

2. *Observasi*

Yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

⁸ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 160.

3. *Angket*

Yaitu penyuguhan beberapa angket yang bersifat pertanyaan pilihan ganda yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

4. *Pustaka*

Yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

G. ANALISA DATA

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif, yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. METODE PENULISAN

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa metode yaitu:

1. *Deduktif* yaitu menggunakan kaedah umum yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
2. *Induktif* yaitu menggunakan kaedah khusus yang ada kaitannya dengan tulisan ini kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.
3. *Deskriptif* yaitu menggunakan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan dianalisa.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam bab ini penulis memaparkan tentang gambaran umum tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat serta ruang lingkup kegiatannya, dan struktur organisasi PNPM di Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB III TELAAH PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan segi teori dari penelitian yang berkenaan dengan pengertian atau definisi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan hasil penelitian serta pembahasan-pembahasannya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup, dalam bab ini akan di kemukakan beberapa kesimpulan yang penulis peroleh dari hasil penelitian yang

dilakukan, serta penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin berguna bagi masyarakat dan pemerintah.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. SEJARAH KECAMATAN PASIR PENYU DAN PROFIL DESA BATU GAJAH

Sebelum Indonesia merdeka Pasir penyu bernama “Amir Van Kelayang” yang berkedudukan di Lubuk Sitarak. Masa pemerintahan ini berjalan sampai pada saat kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945, sejak diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia status Amir Van Kelayang berubah menjadi kecamatan kelayang yang berkedudukan di Kelayang.

Pada masa agresi II kedudukan pemerintah Kecamatan dipindahkan dari Kelayang ke Air Molek, karena dianggap daerah aman dari serangan penjajah yang ingin mencoba berkuasa kembali di Indonesia.

Pada masa Agresi II itulah nama Kecamatan Kelayang berubah menjadi Kecamatan Pasir Penyuyang mana namanya tersebut diambil dari nama binatang yang banyak terdapat di atas pasir sepanjang sungai Indragiri di wilayah Kecamatan Pasir Penyu pada waktu itu yaitu “Penyu” maka semenjak itu kecamatan ini diberi nama Kecamatan Pasir Penyu dengan Ibukotanya Air molek.¹

Kecamatan Pasir Penyu ini adalah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hulu dengan luas wilayah 441,50 KM², dengan jumlah penduduk 25.864 jiwa atau 6075 KK yang terbagi kedalam 8 desa dan 5 kelurahan.

¹ Dokumen Kecamatan Pasir Penyu Air Molek

Batas-batas wilayah dari Kecamatan Pasir Penyu ini adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lirik
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Rengat Barat
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Seberida
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Kelayang

Penduduk Kecamatan Pasir Penyu tersebar di desa-desa atau kelurahan dan sebagian lagi bermukim dipinggiran sepanjang jalan raya, sebagian kecil pemukiman penduduk tidak dapat dilalui dengan kendaraan roda empat yang merupakan daerah dataran tinggi.

Pada Kecamatan Pasir Penyu terdapat beberapa kelurahan dan desa, salah satu desa yang tingkat perekonomiannya tergolong pesat perkembangannya, dengan masyarakatnya yang bersahaja adalah desa Batu Gajah. Mata pencarian masyarakat desa Batu Gajah ini sangat beragam, mulai dari petani, pedagang, industri rumah tangga, karyawan swasta, pegawai negeri dan sebagainya. Namun mata pencarian yang paling mendominasi adalah pedagang dan petani. Desa Batu Gajah yang mempunyai luas dan batas wilayah yaitu:

- a. Luas desa adalah 750 HA
- b. Batas-batas wilayah:
 1. Utara berbatasan dengan desa Candirejo
 2. Selatan berbatasan dengan desa Pesir Keranji
 3. Barat berbatasan dengan desa Jatirejo
 4. Timur berbatasan dengan kelurahan Air Molek I

Adapun kondisi geografis dari desa Batu Gajah ini adalah:

- a. Kondisi tanah dan permukaan laut 32m
- b. Kondisi banyak curah hujan 240 mm/tahun
- c. Kondisi topografi : daratan rendah
- d. Kondisi suhu / udara rata-rata : 195 derajat celcius sampai 34,2 derajat celcius

Jumlah penduduk desa Batu Gajah dilihat dari:

- a. Menurut jenis kelamin

Laki-laki : 876 orang

Perempuan : 1224 orang

- b. Menurut kepala keluarga : 372 KK

- c. Menurut agama

Islam : 2.096 orang

Kristen : 4 orang

Katholik : -

Hindu : -

Budha : -

- d. Menurut mata pencarian

Karyawan : 7 orang

Wiraswasta : 82 orang

Tani : 308 orang

Pertukangan : 17 orang

Buruh tani : 8 orang

Pensiunan : 15 orang

Nelayan : 7 orang

Jasa : 19 orang

e. Menurut mutasi penduduk

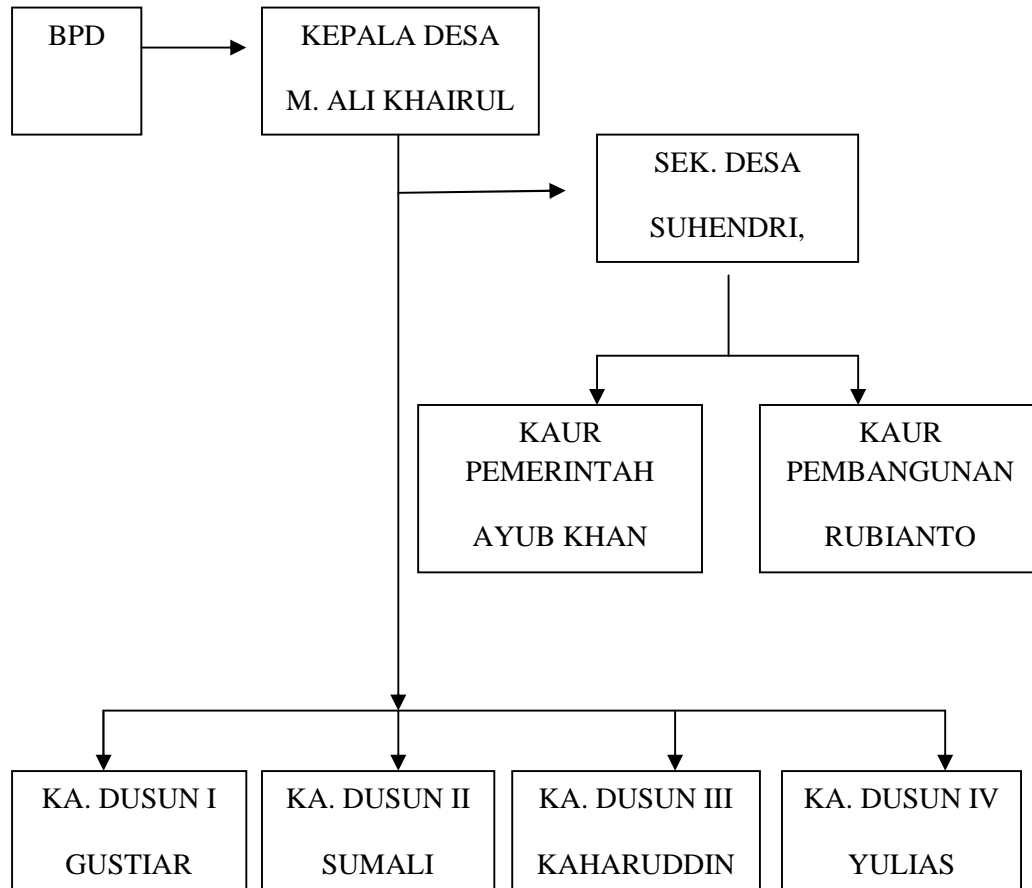
Lahir : 7 orang

Mati : 5 orang

Datang : 9 orang

Pindah : 2 orang

STRUKTUR ORGANISASI DESA BATU GAJAH



B. (PNPM), TUJUAN SERTA VISI DAN MISI

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat².

Pengertian yang terkandung mengenai PNPM adalah :

² Buku Panduan Teknis Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

1. PNPM adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.
2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari PNPM ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari PNPM adalah :

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat

lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representative dan akuntabel.
- c. Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin.
- d. Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- e. Meningkatkan keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- f. Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- g. Meningkatkan inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

Adapun visi dan misi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ini adalah : Secara umum, visi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah terwujudnya masyarakat mandiri dan sejahtera. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ini mempunyai

misal yaitu pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam rangka menanggulangi permasalahan kemiskinan melalui:

1. Peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya.
2. Pelembagaan system pembangunan partisipatif.
3. Pengoptimalan fungsi dan peran pemerintah lokal.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana masyarakat.
5. Pengembangan kemitraan dalam pembangunan.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. KESEJAHTERAAN

Krisis ekonomi adalah hal yang paling berat yang dirasakan masyarakat Indonesia karena menghantam sebagian besar kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengertian kesejahteraan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan dibatasi pada standar hidup dan kekayaan. Standar hidup diukur dari konsumsi riil masyarakat sementara kekayaan dari tabungan riil¹.

Standar hidup dikatakan meningkat manakala konsumsi riil masyarakat meningkat, demikian juga halnya dengan kekayaan, semakin meningkat tabungan masyarakat pada umumnya dapat dikatakan bahwa kekayaan masyarakat mengalami peningkatan².

Hal lain yang merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan atau penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat dan penghasilan itu dapat memenuhi kebutuhan mereka atau masyarakat tersebut.

Pemerintah banyak melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun dalam upaya pembangunan kesejahteraan tentu saja partisipasi dari masyarakat sangat lah penting.

¹ Agus Dwiyanto, *Op Cit*, hal. 61

² *Ibid*

Pembangunan dibidang kesejahteraan mestinya merupakan usaha untuk menciptakan lembaga-lembaga yang menjamin keberlanjutan proses pembangunan tersebut, yang sejauh ini pemerintah telah berusaha untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Di samping itu, untuk mengurangi dan mencegah timbulnya permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat, pemerintah telah berusaha untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan yang tepat terutama bagi lapisan masyarakat yang termasuk dalam masyarakat penyandang masalah kesejahteraan.

B. KREDIT (PINJAMAN)

Kredit dalam bahasa latin disebut “*credere*” yang artinya percaya. Maksudnya pemberi kredit percaya pada penerima kredit, bahwa yang pinjaman yang dislurkannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya³.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdsarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian balas jasa⁴.

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Prsada, 2002) hal. 101.

⁴ Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006), hal 114.

Kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat⁵.

Kredit mengandung unsur-unsur yang diikatkan satu sama lain, sehingga ketika membicarakan kredit maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang sesuai jangka waktunya.

2. Kesepakatan

Kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan kredit.

4. Resiko

⁵ Kasmir, *Op Cit*, hal 102.

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertgihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka akan semakin besar risikonya, demikian sebaliknya.

5. Balas jasa

Bagi pemberi kredit, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit⁶.

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, penyalur dana wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian. Mengingat adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan serta adanya risiko yang selalu melekat dalam penyaluran dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan kreditor selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan debitor untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh debitor⁷.

Beragamnya jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit menjadi beragam. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*

1. Dilihat dari segi kegunaan

a. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek / pabrik atau untuk keperluan rehabilitasi.

b. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a. Kredit produktif

Kredit produktif merupakan kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b. Kredit konsumtif

Yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangan

3. Dilihat dari segi jangka waktu

a. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang jangka waktu pengembaliannya paling panjang. Kredit ini jangka waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dilihat dari segi jaminan

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

b. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik debitur selama berhubungan dengan pihak lain

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, merupakan kredit yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c. Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, menengah maupun industri besar.
- d. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- e. Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- f. Kredit perumahan, merupakan kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- g. Dan sektor-sektor lainnya⁸.

C. EKONOMI KOVENSIONAL DAN EKONOMI SYARIAH

Ekonomi adalah sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Kata “ekonomi: berasal dari kata yunani yang yaitu *Oikos* yang berarti keluarga, rumah tangga, dan *Nomos* atau

⁸ Kasmir, *Op Cit*, hal. 112

peraturan, aturan, hukum, dan secara garis besar Ekonomi diartikan sebagai “aturan rumah tangga”⁹.

Ekonomi sebagai salah satu usaha mempergunakan sumber-sumber daya rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sesungguhnya melekat pada watak manusia. Tanpa disadari, kehidupan manusia sehari-hari didominasi kegiatan ekonomi. Dalam bahasa Arab Ekonomi sering diterjemahkan dengan (), yang berarti hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasional dan nilai secara implisit.

Konsep ekonomi dalam pengertian demikian telah ada sejak manusia memikirkan kebutuhannya, dan akan senantiasa ada dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, kajian modern tentang konsep dan prinsip-prinsip ekonomi menurut tradisi keilmuan barat sejak Adam Smith menerbitkan bukunya *The Wealth of Nations* pada tahun 1970-an¹⁰.

Dalam buku “*The Wealth of Nations*”, Adam Smith membahas tingkat perekonomian masyarakat. Ia membedakan tingkat perekonomian masyarakat kepada dua kategori, pertama: bangsa dan ekonomi terbelakang dan kedua: bangsa dan ekonomi yang maju. Masyarakat yang ekonominya terbelakang ditandai dengan mata pencaharian yang tradisional seperti berburu. Sedangkan masyarakat yang ekonominya maju ditandai dengan mata pencahariannya adalah berdagang. Contoh

⁹ www.google.com

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani Perss, 2001) cet. 1, hal. 12

masyarakat terbelakang adalah masyarakat Indian di Amerika Utara, sedangkan contoh masyarakat yang ekonominya maju adalah bangsa Arab¹¹.

Sistem ekonomi seperti ini telah tumbuh dan berkembang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dengan landasan filsafat sekularisme dan paham liberalisme. Dengan demikian, para pelaku ekonomi dipandang mempunyai kebebasan untuk bertindak sesuai dengan kodrat kemanusiaannya.

Hukum-hukum hubungan dan segala aspirasi sosiologi dianggap berasal dari kebebasan aktivitas manusia. Inilah yang belakangan ini disebut sebagai sistem ekonomi konvensional setelah mengemukakannya istilah ekonomi syariah atau ekonomi Islam.

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan petunjuk Allah SWT untuk memperoleh Ridho-Nya. Petunjuk Allah tentang hal itu setidaknya secara sederhana bisa dipahami dari surat An-Nisa ayat 29 berikut:

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. An-Nisa: 29)*

¹¹ Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007) cet. 1, hal. 15

Pemahaman sederhana ayat ini adalah menunjukkan bahwa Allah melarang umat-Nya untuk memakan hak atau harta orang lain yang bukan miliknya, tetapi Allah menganjurkan manusia untuk melakukan perniagaan yang baik dengan unsur suka sama suka dan kerelaan hati di antara pihak yang melakukan perniagaan.

Islam sebagai agama yang universal dan agama yang terakhir diturunkan akan mengatur seluruh sistem hidup manusia baik secara garis besar maupun kehidupan manusia di bumi. Maka secara logika sehat, maka Islam memiliki sistem sempurna dan garis-gari yang jelas tentang sistem ekonomi yang mesti dijalankan oleh setiap muslim.

Namun demikian, ekonomi Islam sebagai kajian yang berdiri sendiri dengan menggunakan ilmu-ilmu modern, tidak terlepas dari ilmu fiqih. Para ilmuwan klasik dan pertengahan memang banyak diantaranya mempunyai pemikiran-pemikiran ekonomi yang dianggap tetap aktual sampai sekarang, meskipun pada zamannya pemikiran itu belum dianggap berdiri sendiri sebagai kajian ekonomi. Misalnya Ibnu Khaldun dan Ibnu Taimiyyah.

Aktivitas ekonomi dalam pandangan islam bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan hidup seseorang secara sederhana
2. Memenuhi kebutuhan jangka panjang
3. Memberi bantuan sosial dan sumbangan menurut jalan Allah.

Bahwa Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-matrealisme, individualisme-sosial,

jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal ini dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian di kemudian hari¹².

Menurut M. Yasir Nasution mengutip Jhon L. Espositi, bahwa ada tiga karakteristik yang melekat pada ekonomi Islam, yaitu:

1. Inspirasi dan petunjuknya dicari di dalam Al-Quran dan Sunnah.
2. Perspektif dan pandangan ekonomi-ekonominya mempertimbangkan peradaban Islam sebagai sumber.
3. Bertujuan untuk menemukan dan menghidupkan kembali nilai-nilai, prioritas dan etika ekonomi komunitas muslim pada periode awal.

Artinya bisa disimpulkan bahwa ada perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu pada landasan filosofinya dan asumsi-asumsi tentang manusia. Pendeknya, karakteristik itu disimpulkan oleh Yusuf Qordawi dengan karakteristik ketuhanan, karakteristik etika, karakteristik keseimbangan dan karakteristik kemanusiaan¹³.

¹² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000) hal. 3

¹³ Menurut M. yasir Nasution dikutip dari Jhon L. Espositi yang ditulis oleh: Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani, 1997) hal. 31

1. Karakteristik ilahiyah (ketuhanan)

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berlandaskan Ilahiyah. Sistem ini bertitik tolak dari Allah adalah bahwa seluruh aktivitas ekonomi berawal dari adanya perintah Allah. Perintah ini diberikan oleh Allah bersamaan dengan diberikannya sistem yang harus dijalani oleh manusia, artinya seluruh aktivitas ekonomi harus berdasarkan sistem yang telah dibuat Allah itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan bertujuan akhir kepada Allah adalah bahwa setiap aktivitas ekonomi adalah bukan tujuan melainkan sarana untuk menggapai tujuan yang lebih tinggi daripada itu, yakni ridho Allah.

Selain sistem yang diberikan Allah juga instrumen-instrumen yang boleh dipakai dalam melaksanakan aktivitas ekonomi itu. Islam mempunyai batasan dalam menggunakan instrumen itu walaupun Allah sendiri menciptakan instrumen yang lain. Biasanya instrumen yang dipakai itu mempunyai daya manfaat yang lebih signifikan daripada biasanya. Misalnya seorang muslim tidak boleh berbisnis dengan menggunakan minuman keras sebagai komoditi bisnisnya, karena minuman keras walaupun ada manfaatnya tetapi bahayanya lebih besar.

2. Karakteristik etika

Sesuatu yang membedakan Islam dengan sistem lain adalah bahwa Islam tidak pernah membedakan ekonomi dengan etika, sebagaimana tidak pernah memisahkan ilmu dengan akhlak, politik dengan etika, dan sebagainya. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul-Nya untuk membenahi akhlak manusia.

Menurut Yusuf Qardawi, individu maupun kelompok dalam lapangan bisnis di suatu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya. Masyarakat tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikan atau mengkonsumsinya. Ia terikat oleh buhul akidah dan etika mulia di samping juga dengan hukum-hukum Islam.

3. Karakteristik keseimbangan

Jika tatanan dalam Islam adalah keseimbangan yang adil, maka hal ini terlihat jelas pada sikap Islam terhadap individu dan masyarakat. Kedua hak itu diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil (pertengahan) tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan. Islam juga bersikap di tengah-tengah antara iman dan kekuasaan.

Ekonomi adalah bagian dari tatanan Islam yang prespektif. Islam meletakkan ekonomi pada posisi tengah yang adil dan dalam bidang ekonomi keseimbangan diterapkan dalam segala segi imbang antara modal dan usaha, antara produksi dan konsumsi, antara produsen dan konsumen, dan antara golongan-golongan dalam masyarakat. Keseimbangan juga terlihat pada sistem pengambilan keuntungan atau laba. Walaupun Islam tidak membatasi pengambilan laba asalkan didasari oleh saling suka, tetapi tetap pada keseimbangan dan tidak boleh berlebihan.

Norma menengah yang paling menonjol dalam lapangan terletak pada dua sendi yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman Islam tentang kedudukan harta. Islam adalah agama tengah-tengah antara aliran dan filsafat yang memerangi segala bentuk kehidupan dunia yang baik-baik dengan aliran materialisme yang menjadikan harta sebagai Tuhan yang disembah dan bahwa kehidupan ini hanya untuk dunia (hedonisme)
- b. Pemahaman Islam tentang hak individu. Islam berdiri antara kelompok yang mengakui hak individu sehingga seseorang menganggap harta itu hak miliknya secara mutlak dan kelompok yang memerangi hak tersebut¹⁴.

4. Karakteristik kemanusiaan

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman dan sejahtera¹⁵. Maksudnya manusia di sini ialah semua golongan manusia, baik manusia yang sehat atau sakit, kuat atau lemah, susah atau senang, serta manusia sebagai anggota masyarakat.

Untuk melaksanakan tugasnya Allah memberikan kepada manusia kekuatan dan alat sehingga bisa melaksanakan tugasnya. Kemudian tugas manusia lah untuk mengelola dan menjadikan seluruh isi alam ini bermanfaat baginya dan bisa dinikmati manusia.

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Op Cit*, hal 72

¹⁵ *Ibid*

Dengan demikian, dalam ekonomi Islam manusia dan faktor kemanusiaan merupakan unsur utama. Manusia berada dalam posisi yang menentukan di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia dengan cara yang baik dan tidak berlebihan untuk menuju taqwa.

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa garis-garis kehidupan ekonomi telah tercantum secara lengkap di dalam Al-Qur'an. Setiap muslim harus meyakini dan menjalankannya untuk kebaikan kehidupan dunia dan akhirat.

BAB IV

**EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT-SIMPAN PINJAM PEREMPUAN (PNPM-SPP) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU GAJAH AIR MOLEK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT TINJAUAN EKONOMI
ISLAM**

**A. Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam
Mensejahterakan Kehidupan Masyarakat**

Kondisi krisis ekonomi yang akhir-akhir ini melanda, menyebabkan kondisi perekonomian rumah tangga ikut mengalami dampaknya. Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) menampilkan kiprahnya dalam usaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan salah satu produknya yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

PNPM adalah program nasional dalam kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui angket, di sini penulis mengukur tingkat efektivitas program pemerintah ini dalam usahanya menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pada PNPM ini efektifitas diwujudkan dalam bentuk pengadaan barang atau jasa oleh masyarakat harus dilakukan secara tepat kuantitas, tepat kualitas, tepat waktu, dan tepat pemanfaatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan.

Adapun data peminjam per tahun 2008-2009 adalah:

Tabel IV. I

Nama kelompok : Maju Usaha Sepakat

Pinjaman : Rp. 59.000.000,-

Bunga / balas jasa : 15% per tahun

No	Nama Peminjam	Besar Pinjaman
1	Tuti Susanti	Rp. 8.000.000,-
2	Ratna Dewi	Rp. 7.000.000,-
3	Arnidar	Rp. 7.000.000,-
4	Sumarni	Rp. 7.000.000,-
5	Yasnah	Rp. 7.000.000,-
6	Leni Marlina	Rp. 8.000.000,-
7	Wagiem	Rp. 8.000.000,-
8	Revi Indriani	Rp. 7.000.000,-
	Total	Rp. 59.000.000,-

Tabel IV.2

Nama kelompok : Kamboja

Pinjaman : Rp. 46.000.000,-

Bunga / balas jasa : 15% per tahun

No	Nama Peminjam	Besar Pinjaman
1	Junaida	Rp. 7.000.000,-
2	Supartini	Rp. 7.000.000,-

3	Defita	Rp. 7.000.000,-
4	Afriani	Rp. 5.000.000,-
5	Yuliana	Rp. 5.000.000,-
6	Waginem	Rp. 7.000.000,-
7	Rahma	Rp. 4.000.000,-
8	Erni Wati	Rp. 4.000.000,-
	Total	Rp. 46.000.000,-

Tabel IV. 3

Nama kelompok : Mawar

Pinjaman : Rp. 78.000.000,-

Bungan / balas jasa : 15% per tahun

No	Nama Peminjam	Besar Pinjaman
1	Masni	Rp. 8.000.000,-
2	Sri Rayuni	Rp. 8.000.000,-
3	Elli Yati	Rp. 7.500.000,-
4	Sukarnawati	Rp. 8.000.000,-
5	Sarmini	Rp. 7.000.000,-
6	Rostika	Rp. 8.000.000,-
7	Nurlely	Rp. 7.500.000,-
8	Peni Rubmita	Rp. 8.000.000,-
9	Yosines	Rp. 8.000.000,-
10	Titi Sumiati	Rp. 8.000.000,-

	Total	Rp. 78.000.000,-
--	-------	------------------

Tabel IV. 4

Nama kelompok : Nusa Indah
Pinjaman : Rp. 60.000.000,-
Bunga / balas jasa : 15% per tahun

No	Nama Peminjam	Besar Pinjaman
1	Ratih Pratiwi	Rp. 8.000.000,-
2	Suratmi	Rp. 7.000.000,-
3	Khairunnisa	Rp. 8.000.000,-
4	Rosida	Rp. 7.000.000,-
5	Nurisa	Rp. 7.000.000,-
6	Hartati	Rp. 8.000.000,-
7	Susanti	Rp. 8.000.000,-
8	Eliwati	Rp. 7.000.000,-
	Total	Rp. 60.000.000,-

Kondisi perekonomian masyarakat peminjam setelah mendapatkan dana pinjaman dari PNPM-SPP dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel IV. 5

Kondisi Perekonomian Masyarakat Setelah Mendapat Pinjaman Dana dari PNPM-SPP

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Sangat Baik	15	43%
2	Baik	18	51%
3	Biasa saja	2	6%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa kondisi masyarakat setelah mendapat pinjaman dana dari PNPM-SPP mengalami kondisi yang sangat baik sebanyak 15 orang responden atau sekitar 43%, yang menyatakan kondisinya baik 18 oarang responden atau 51% sedangkan ada 2 orang responden atau 6% yang menyatakan kondisinya biasa saja. Jadi, kondisi masyarakat setelah menerima pinjaman tergolong baik, dapat dilihat dari usaha salah satu penerima dana pinjaman yang mempunyai usaha pembuatan kue mengaku mengalami peningkatan pada usahanya dan keuntungan yang didapatpun meningkat, karena peralatan yang dipakai untuk usahanya sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Adapun prosedur yang berlaku telah sesuai atau tudak dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV. 6

Kesesuaian Prosedur Penerima Dana PNPM-SPP

No	Jawaban responden	Responden	Persentase
1	Telah sesuai	27	77%
2	Kurang sesuai	2	6%
3	Tidak tahu	6	17%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 27 orang atau 77% menyatakan penerima dana telah sesuai dengan prosedur PNPM-SPP, sebanyak 2 orang responden atau 6% menyatakan kurang sesuai, dan 6 orang responden atau 17% menyatakan tidak tahu dengan prosedur dari program ini. Jadi, dapat kita lihat dari tabel di atas bahwa prosedur dari PNPM ini telah sesuai karena lebih dari separuh responden menyatakan prosedur penerima dana telah sesuai.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan peminjam dana, mereka menyebutkan prosedur pinjaman dana PNPM-SPP ini hampir sama dengan permohonan kredit di bank, namun pada program ini tidak serumit prosedur di bank.

Prosedur yang harus dipenuhi adalah permohonan pinjaman, syarat-syarat administrasi dan jaminan, kemudian pihak PNPM-SPP akan melakukan survey usaha yang dijalani oleh peminjam dan untuk pencairan dananyapun tidak membutuhkan waktu yang lama, dapat dilihat dari tabel dibawah:

Table. IV. 7

Lama Prosedur Pencairan Dana

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	1 sampai 3 bulan	27	77%
2	3 sampai 6 bulan	8	23%
3	6 bulan ke atas	0	0%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 27 orang responden atau 77% menyatakan prosedur pencairan dana hanya selama 1 sampai 3 bulan, sebanyak 8 orang responden atau 23% menyatakan lama prosedur pencairan dana berkisar selama 3 sampai 6 bulan, dan tidak ada yang menyatakan di atas 6 bulan.

Peminjam dana PNPM-SPP ini biasanya untuk mendapatkan pinjaman harus memenuhi syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan antara lain:

- a. Foto kopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Foto kopy Kartu Keluarga (KK)
- c. Jaminan berupa BPKB sepeda motor

Masyarakat biasanya mengajukan permohonan terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman, maka selanjutnya akan dilihat oleh pihak PNPM, berikut ini dapat dilihat kesesuaian permohonan dengan pinjaman yang diberikan pada tabel IV.8.

Tabel IV. 8

Kesesuaian Permohonan Pinjaman dengan Pinjaman yang Diberikan

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Sudah sesuai	9	26%
2	Di bawah pengajuan	25	71%
3	Tidak sesuai	1	3%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 9 orang responden atau 26% menyatakan permohonan pinjaman yang diajukan sudah sesuai dengan pinjaman yang diberikan, sebanyak 25 orang responden atau 71% menyatakan pemberian pinjaman di bawah jumlah yang diajukan dan hanya satu orang responden atau sebesar 3% menyatakan tidak sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pinjaman yang diberikan kebanyakan di bawah jumlah yang diajukan sesuai dengan hasil survey, dari survey ini nantinya akan ditentukan jumlah pinjaman yang diberikan.

Salah satu peminjam dana yaitu ibu Sudastik mengungkapkan bahwa ia mengajukan pinjaman sebesar Rp. 5.000.000,-, tapi pinjaman yang ia dapatkan sebesar Rp. 4.000.000,-¹.

Adapun jangka waktu pengembalian pinjaman yang diberikan dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

¹ Sudastik, (Peminjam dana PNPM-SPP) *wawancara*, tanggal 28 Agustus 2010

Tabel IV. 9

Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	1 sampai 6 bulan	10	29%
2	Satu tahun	25	71%
3	Di atas satu tahun	0	0%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang responden atau 29% menyatakan jangka waktu pengembalian pinjaman selama 1 sampai 6 bulan, sebanyak 25 orang responden atau 71% menyatakan jangka waktu pengembalian dana pinjaman selama satu tahun, dan tidak ada yang menyatakan di atas satu tahun.

Pada pinjaman Simpan Pinjam Perempuan yang diberikan terdapat bunga yang dibebankan kepada peminjam, berikut ini pendapat peminjam yang dapat dilihat pada tabel.

Tabel IV. 10

Balas Jasa dalam Pengembalian Pinjaman

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Dikenakan Bunga	26	74%
2	Tidak ada bunga	0	0%
3	Lainnya (selain bunga)	4	11%

	Jumlah	35	100%
--	--------	----	------

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa sebanyak 26 orang responden atau 74% menyatakan pinjaman ini memang dikenakan bunga, dan 4 orang responden atau 11% menyatakan ada yang lain selain bunga yang dikenakan kepada peminjam sewaktu mengembalikan pinjaman biasanya ada simpanan yang dilakukan oleh peminjam yaitu dibayar setiap bulan membayar angsuran dan nanti akan diambil pada pelunasan pinjaman. Simpanan ini tidak wajib melainkan hanya bagi peminjam yang mau saja, tetapi kebanyakan peminjam membayar uang simpanan ini.

Sebagai peminjam dana masyarakat tentu tidak semua masyarakat yang merasa setuju dengan bunga atau balas jasa yang ditentukan, namun karena mereka membutuhkan pinjaman tersebut maka mereka harus membayar bunga atau balas jasa. Di bawah ini dapat dilihat pendapat masyarakat tentang memberatkannya bunga atau balas jasa tersebut.

Tabel IV. 11

Tingkat Kesulitan/Memberatkannya Bunga atau Balas Jasa

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Tidak Memberatkan	26	74%
2	Cukup Memberatkan	7	20%
3	Memberatkan	2	6%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 26 orang responden atau 74% menyatakan bunga yang diberikan tidak memberatkan mereka, sebanyak 7 orang responden atau 20% menyatakan bunga yang diberikan cukup memberatkan, dan 2 orang menyatakan memberatkan bila dikenakan bunga. Jadi, dari tabel di atas kebanyakan responden merasa tidak merasa keberatan dengan adanya bunga dari pinjaman yang diberikan.

Melihat tabel-tabel di atas yang telah diisi oleh responden, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program PNPM-SPP ini efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dilihat dari pinjaman yang diberikan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha yang mereka miliki.

Program pemerintah ini pun banyak memberikan keuntungan bagi masyarakat peminjam dana, seperti hasil produksi yang meningkat, volume usaha yang semakin meningkat, mempunyai peralatan yang sudah memadai, dan lain sebagainya.

Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan salah satu peminjam dana, maka persentase keuntungan hasil usaha yang didapatkan oleh mereka berkisar 10% sampai 15%, dan hal ini menunjukkan bahwa program ini telah memberikan hasil yang baik bagi masyarakat peminjam dana².

² Junaida, (Peminjam dan PNPM-SPP) *wawancara*, tanggal 29 Agustus 2010.

B. Tanggapan Masyarakat terhadap Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM banyak mendapat tanggapan dari masyarakat, khususnya salah satu produknya yaitu Simpan Pinjam Perempuan yaitu pinjaman dana yang diberikan kepada perempuan-perempuan yang mempunyai usaha.

Pada awalnya usaha mereka terbilang biasa-biasa saja dan terlihat tidak maju karena kendala kekurangan modal, namun setelah program ini terealisasi maka mereka yang mendapatkan bantuan modal merasakan bahwa usaha mereka sedikit demi sedikit mengalami peningkatan.

Masyarakat memberikan tanggapan yang baik terhadap program pemerintah ini, dapat dilihat dari penelitian yang penulis lakukan dengan melihat angket yang diisi oleh responden yang dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini.

Tabel IV. 12

Pengetahuan Responden tentang Keberadaan PNPM-SPP

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Sangat tahu	22	63%
2	Cukup tahu	10	29%
3	Kurang tahu	3	8%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang responden atau 63% menyatakan sangat tahu dengan keberadaan PNPM tersebut, sebanyak 10 orang responden atau 29% menyatakan cukup tahu, sedangkan 3 orang responden atau 8% menyatakan kurang tahu terhadap program ini. Jadi, melihat tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat telah banyak yang mengetahui tentang keberadaan program tersebut.

Pengetahuan responden tentang PNPM-SPP ini didapat dari penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh pihak dari PNPM-SPP kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengenal lebih jauh program-program yang dilaksanakan dan akan di tujukan kepada masyarakat juga³.

Adapun pengetahuan responden terhadap program PNPM-SPP ini dapat dilihat waktu ketahuannya dari tabel di bawah ini.

Tabel IV. 13

Waktu Ketahuan Responden terhadap PNPM-SPP

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Sudah lama	18	51%
2	Cukup lama	14	40%
3	Baru tahu	3	9%
	Jumlah	35	100%

³ Iwan, (Ketua PNPM-SPP) wawancara, tanggal 29 agustus 2010.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 18 orang responden atau 51% menyatakan sudah lama mengetahui program PNPM-SPP ini, sebanyak 14 orang responden atau 40% menyatakan cukup lama mengetahui program ini, dan ada sebanyak 3 orang responden atau 9% menyatakan baru tahu. Jadi masyarakat sebagian besar sudah lama mengetahui program ini.

Banyak responden yang memberikan pendapat terhadap hadirnya PNPM-SPP ini, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV. 14

Pendapat Responden tentang Manfaat Keberadaan PNPM-SPP

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Sangat membantu	24	68%
2	Cukup membantu	9	26%
3	Biasa-biasa saja	2	6%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 24 orang responden atau 68% menyatakan keberadaan program ini sangat membantu, sebanyak 9 orang responden atau 26% menyatakan keberadaan program ini cukup membantu, dan ada 2 orang responden atau 6% menyatakan biasa-biasa saja. Jadi keberadaan program ini sangat

bermanfaat untuk masyarakat dilihat dari banyaknya masyarakat yang mendukung program ini berjalan.

Program PNPM-SPP ini mulai dikenalkan oleh pihak yang terkait pada tahun 2007 dan mendapat respon yang baik dari masyarakat, respon tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel IV. 15

Tanggapan Responden terhadap Keberadaan PNPM-SPP di Desa Batu Gajah

No	Jawaban Responden	Responden	Persentase
1	Sangat baik	22	63%
2	Cukup baik	10	29%
3	Biasa-biasa saja	3	8%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebanyak 22 orang responden atau 63% menyatakan keberadaan PNPM-SPP di desa Batu Gajah ini sangat baik, sebanyak 10 orang responden atau 29% menyatakan program ini cukup baik, dan ada sebanyak 3 orang responden atau 8% yang menyatakan biasa-biasa saja. Jadi dilihat dari tabel di atas bahwa keberadaan program ini sangat baik bagi masyarakat.

Dari tanggapan-tanggapan yang diberikan oleh masyarakat yang dapat dilihat dari hasil angket yang diisi oleh responden atau masyarakat penerima dana pinjaman,

dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat sangat baik terhadap keberadaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dapat dilihat dari:

- a. Antusias masyarakat yang sangat besar dengan adanya program ini
- b. Banyaknya masyarakat yang berpartisipasi
- c. Masyarakat menyambut baik masuknya program ini ke desa Batu Gajah.

C. Tinjauan Ekonomi Islam tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, Islam mempunyai system ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta dilengkapi dengan Al-Ijma dan Al-Qiyas. sistem ekonomi Islam saat ini lebih dikenal dengan istilah system ekonomi syariah.

Fasilitas ekonomi syariah ini mempunyai beberapa tujuan diantaranya:

- a. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam
- b. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal
- c. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata
- d. Menciptakan kebebasan menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial

- e. Ekonomi syariah merupakan bagian dari system perekonomian syariah, yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep pada “*amar ma'ruf nahi mungkar*” yang berarti mengerjakan yang benar meninggalkan yang dilarang⁴.

Berbicara tentang bunga, sejak dahulu menjadi perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim. Perbedaan pendapat tersebut muncul disebabkan oleh perbedaan metode dan analogi hukum yang digunakan. Misalkan apakah bunga itu identik dengan riba?.

Sebagai lembaga keuangan masyarakat biasa yang juga bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, maka program Simpan pinjam Perempuan ini memberikan bunga pinjaman kepada peminjam.

Dalam agama Islam, membantu dan saling menolong adalah dianjurkan dan bisa menjadi wajib apabila disekitar kita ada orang yang sangat membutuhkan bantuan dari kita dalam hal kebaikan. Demikian juga halnya tolong menolong dalam memberikan pinjaman atau hutang kepada orang yang sangat membutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 2:

⁴ Marza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, (Pekanbaru : Unri Perss, 2004), hal. 3

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*⁵. (Al-Maidah : 2).

Dilihat dari tujuan penyaluran pinjaman untuk perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mereka mengalami kekurangan modal dan berdasarkan ayat di atas, maka sangatlah tepat dan searah dengan tujuan ekonomi Islam untuk membantu kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi, karena pada dasarnya pinjaman ini diberikan untuk membantu usaha para perempuan yang mengalami kekurangan modal dan ingin mengembangkan usahanya, serta bukan hanya semata-mata mencari keuntungan dalam berbisnis sebagai tujuan utamanya.

Islam mengajarkan pada kita bahwasanya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khusu' dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah SWT. Karena nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwasanya kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dann juga Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya, dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusu' dalam beribadah kepada sang pencipta-Nya yaitu Allah SWT.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya dasar pengharaman riba adalah kezaliman dan ketidakadilan terhadap pinjaman tersebut. Dari penelitian yang penulis

⁵ Departemen Agama RI, *Log. Cit*, hal. 156

lakukan bahwasanya masyarakat yang mendapat pinjaman dana sebagian besar mengatakan tidak merasa berat dalam pengembalian pinjaman tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya nasabah mengatakan ada bunga dalam pengembalian pinjaman yang diberikan, namun masyarakat yang mendapatkan pinjaman tidak merasa berat dengan bunga tersebut. Hal ini karena masyarakat merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, karena mereka merasa kekurangan modal mereka terbantu.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini sangatlah efektif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari tanggapan masyarakat yang mendapat pinjaman dana, dan mereka merasa kekurangan modal mereka terbantu dengan adanya pinjaman ini.
2. Adapun tanggapan masyarakat terhadap adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangatlah baik, di mana antusias masyarakat sangat besar dengan adanya program ini, karena mereka merasa program ini sangat membantu mereka.
3. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pihak pemberipinjam kepada pihak yang meminjam dana, dan masyarakat yang meminjam tidak merasa diberatkan dengan balas jasa yang diberikan.

B. SARAN

Adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) khususnya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa Batu Gajah ini masih perlu melakukan perbaikan yang bersifat konstruktif, seperti:

1. Menambah jumlah penerima pinjaman agar terjadi pemerataan pada setiap masyarakat khususnya perempuan-perempuan yang mempunyai usaha dan mengalami kekurangan modal agar usaha mereka dapat lebih berkembang dan maju.
2. Mengembangkan program ini dengan produk-produk yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih banyak lagi, agar lebih banyak masyarakat yang merasakan hasil dari program PNPM ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Herman, 2009, *Geliat Pembangunan Kota Pekanbaru Menuju Kota Terkemuka di Indonesia*, RM. Book: Jakarta.

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, CV. Toha Putra: Semarang.

Dwiyanto, Agus, DKK, 2005, *Kemiskinan dan Otonomi Daerah*, LIPI Press: Jakarta.

Gamal, Marza, 2004, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Unri Perss: Pekanbaru.

Hasibuan, H. Malayu, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara: Jakarta.

Internet, www.gogle.com.Search:PNPMMandiri, 28 desember 2009.

Internet, www.gogle.com.visimisiPNPM, 05 Januari 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2005, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Balai Pustaka: Jakarta.

Karim, Adiwarman, 2001, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani: Jakarta.

Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Konten, DC dan Sjarir, 1988, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Lubis, Mulya, 1986, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, LP3ES: Jakarta.

Mawardi, 2007, *Ekonomi Islam*, Alaf Riau: Pekanbaru.

Mujahidin, Ahmad, 2007, *Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Qardawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani: Jakarta.

-----, 2001, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Pers: Jakarta.

Said, Muh, 2008, *Pengantar Ekonomi Islam*, Suska Perss: Pekanbaru.

Sholahuddin, 2007, *Asaz-Asaz Ekonomi Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Sukirno, Sadono, 1997, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Rajawali Pers: Jakarta.

Teguh, Muhammad, 2005, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Triandaru, Sigit dan Totok Budi santoso, 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat: Jakarta.

DAFTAR TABEL

Tabel IV .1	Data Peminjam Kelompok Maju Usaha Sepakat	36
Tabel IV .2	Data Peminjam Kelompok Kamboja	36
Tabel IV .3	Data Peminjam Kelompok Mawar.....	37
Tabel IV .4	Data Peminjam Kelompok Nusa Indah.....	38
Tabel IV .5	Kondisi Perekonomian Masyarakat Setelah Mendapat Pinjaman Dana dari PNPM-SPP	38
Tabel IV .6	Kesesuaian Prosedur Penerima Dana PNPM-SPP.....	39
Tabel IV .7	Lama Prosedur Pencairan Dana	40
Tabel IV .8	Kesesuaian Permohonan Pinjaman dengan Pinjaman yang Diberikan.....	41
Tabel IV .9	Jangka Waktu Pengembalian Pinjaman	42
Tabel IV .10	Balas Jasa dalam Pengembalian Pinjaman	43
Tabel IV .11	Tingkat Kesulitan/Memberatkannya Bunga atau Balas Jasa	44
Tabel IV. 12	Pengetahuan Responden Tentang PNPM-SPP.	46
Tabel IV. 13	Waktu Ketahuan Responden Terhadap PNPM-SPP.....	47
Tabel IV. 14	Pendapat Responden tentang Manfaat Keberadaan PNPM- SPP.	47
Tabel IV. 15	Tanggapan Responden terhadap Keberadaan PNPM-SPP di Desa Batu Gajah.....	48

KUESIONER (ANGKET)
EFEKTIVITAS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT-SIMPAN PNJAM PEREMPUAN (PNPM-SPP) TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA BATU GAJAH AIR MOLEK
KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT TINJAUAN EKONOMI
ISLAM

NAMA: MITA ERIASTI

NIM: 10625003864

Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau

A. Petunjuk pengisian:

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan skripsi dan tidak ada pengaruh apapun.
2. Mohon diisi dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu pilihan point a, b, dan c yang tersedia setiap pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu/Sdr/i.
3. Atas partisipasi Bapak/Ibi/sdr/i dalam pengisian angket ini, diucapkan terima kasih.

B. Identitas pengisi kuesioner

Pendidikan :

Umur :

Pekerjaan :

Agama :

Pendapatan :

C. Pertanyaan

1. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/i kondisi perekonomian masyarakat setelah program ini terealisasi?
 - a. Sangat baik
 - b. Baik
 - c. Biasa saja
2. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah penerima bantuan PNPM-SPP ini telah sesuai dengan prosedur?
 - a. Telah sesuai
 - b. Kurang sesuai
 - c. Tidak tahu
3. Berapa lama prosedur pencairan dana pinjamannya?
 - a. 1 sampai 3 bulan
 - b. 3 sampai 6 bulan
 - c. 6 bulan sampai 1 tahun
4. Apakah dana pinjaman yang diberikan sudah sesuai dengan permohonan pinjaman yang diajukan?
 - a. sesuai
 - b. Dibawah pengajuan
 - c. tidak sesuai
5. Berapa lama jangka waktu pengembalian pinjaman?
 - a. 1 sampai 3 bulan
 - b. 3 sampai 6 bulan
 - c. 6 bulan sampai 1 tahun
6. Apakah dana yang dipinjamkan ini dalam pengembaliannya dikenakan bunga?
 - a. Ya, dikenakan bunga
 - b. Kadang-kadang
 - c. Lainnya, (selain bunga)

7. Apakah bunga tersebut memberatkan bagi Bapak/Ibu/Sdr/i?
 - a. Tidak memberatkan
 - b. Sedikit memberatkan
 - c. Sangat memberatkan
8. Apakah Bapak/Ibu/Sdr/i sudah mengetahui tentang adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP)?
 - a. Sangat tahu
 - b. Cukup tahu
 - c. Kurang tahu
9. Apakah sudah lama Bapak/Ibu/Sdr/i mengetahui keberadaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) ini?
 - a. Sudah lama
 - b. Cukup lama
 - c. Baru tahu
10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah keberadaan PNPM-SPP ini sudah dapat membantu perekonomian masyarakat ?
 - a. Sangat membantu
 - b. Cukup membantu
 - c. Biasa-biasa saja
11. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr/i dengan adanya program pemerintah PNPM-SPP ini?
 - a. Sangat baik
 - b. Cukup baik
 - c. Biasa-biasa saja

Alasan,

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur pencairan dana PNPM-SPP ini?
2. Apa saja manfaat yang diberikan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Simpan Pinjam Perempuan (PNPM-SPP) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
3. Setelah PNPM-SPP terealisasi, apa saja pembangunan perekonomian masyarakat yang telah tampak?
4. Dalam hal apa saja pembangunan yang dilakukan oleh PNPM-SPP dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat?
5. Setelah program ini terealisasi, bagaimana tanggapan masyarakat?
6. Berapa besar keuntungan yang dirasakan oleh peminjam dana?
7. Pinjaman yang diberikan digunakan untuk apa dalam usaha yang anda kelola?
8. Dari manakah mengenal PNPM-SPP?